FORM 4 : Formulir Pengisian Evaluasi Kinerja Pencapaian Sasaran TPB/SDGs Untuk SKPD dan Instansi Vertikal
PILAR PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

Nama Tujuan (1)														
Nama Target (2)														
Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
PROGRAM PEMERINTAH														
TUJUAN 6: AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK (MENJAMIN KETERSEDIAAN SERTA PENGELOLAAN AIR BERSIH DAN SANITASI YANG BERKELANJUTAN UNTUK SEMUA)														
6.1.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan air minum yang dikelola secara aman.	Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan							51%	66%	29,5	●		Dinkes
6.1.1 (a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman				56,28	62,04	67,75	60,80%	61,97%	60,28%	▶		Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Minum												Dinas PUPR
6.1.1 (b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau	Presentase jumlah tampungan air embung, situ, waduk yang dibangun			--	--	--	--						Dinas PUPR
6.1.1 (c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Presentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum yang aman		%	49,35	56,28	62,04	67,75	60,80%	61,97%	60,28%	▶		Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Minum												Dinas PUPR
6.2.1	Proporsi populasi yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman, termasuk fasilitas cuci tangan dengan air dan sabun.	Persentase cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai												Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Limbah												Dinas PUPR
6.2.1 (a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Persentase Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program CTPS (Cuci Tangan Pakai Sabun)		%	100	100	100	100	100	100	100	●		Dinkes
6.2.1 (b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Persentase cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai		%	28,16	100	100	100	59,31	69,86	74,7	▶		Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Limbah												Dinas PUPR
6.2.1 (c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Persentase Desa/Kelurahan yang melaksanakan STBM		Desa/Kelurahan	113	135	141	151	129	155	155	●		Dinkes

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
6.2.1 (d)	Jumlah desa/kelurahan yang *Open Defecation Free* (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Persentase PHBS Provinsi Kalsel		Desa/Kelurahan	18	20	22	24	20	23	25	●		Dinkes
6.2.1 (e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.													
6.2.1 (f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Persentase cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai		%	49,35	56,28	62,04	67,75	59,31	69,86	74,7	●		Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Limbah												Dinas PUPR
6.3.1	Proporsi limbah cair yang diolah secara aman.	Persentase cakupan pelayanan sistem air limbah domestik yang memadai							5,18	6,04	7,1			Dinas PUPR
		Cakupan Pelayanan Air Limbah												Dinas PUPR
6.3.1 (a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).													
6.3.1 (b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.													
6.3.2	Proporsi badan air dengan kualitas air ambien yang baik.													
6.3.2 (a)	Kualitas air danau													
6.3.2 (b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Persentase parameter kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	Bid Pengendalian Dampak Lingkungan DLH Batola	%	73,6	74,3	75,1	75,8	77,8	78,02	50,1	▶		DLH
		Meningkatnya sarana dan prasarana supply air curah hujan dan air baku												Dinas PUPR
6.4.1	Perubahan efisiensi penggunaan air dari waktu ke waktu.	Persentase penghematan energi												Dinas ESDM
6.4.1 (a)	Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah	Persentase masyarakat yang memanfaatkan air bersih dari air tanah		%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Dinas PUPR
6.4.1 (b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri													
6.4.2	Tingkat *water stress:* proporsi pengambilan (withdrawal) air tawar terhadap ketersediannya	Persentase luas wilayah potensi air tanah yang terpetakan												

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
6.5.1	Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu (0-100).													
6.5.1 (a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).													
6.5.1 (b)	Jumlah stasiun hidrologi dan klimatologi yang dilakukan updating dan revitalisasi.													
6.5.1 (c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Persentase penurunan muka air tanah												
6.5.1 (d)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang meningkat jumlah mata airnya dan jumlah DAS yang memiliki Memorandum of Understanding (MoU) lintas Negara.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL		%	2,53	5	5	5	N/A	N/A	N/A			Dishut
6.5.1 (e)	Luas pengembangan hutan serta peningkatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) untuk pemulihan kawasan DAS.	Persentase penambahan luas izin dan pengelolaan perhutanan sosial		Ha	9,53	20	20	20	N/A	N/A	N/A			Dishut
6.5.1 (f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.													
6.5.1 (g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Sumber Daya Air		Jmlh Dok	1	1	1	1	1	1	1			Dinas PUPR
6.5.1 (h)	Jumlah DAS Prioritas yang meningkat jumlah mata airnya melalui konservasi sumber daya air di daerah hulu DAS serta sumur resapan.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL		Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Dishut
		Persentase penurunan muka air tanah												Dinas ESDM
6.5.1 (i)	Jumlah DAS Prioritas yang dipulihkan kesehatannya melalui pembangunan embung, dam pengendali, dam penahan skala kecil dan menengah.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL		Unit	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			Dishut
6.5.2	Proporsi wilayah cekungan lintas batas dengan pengaturan kerja sama sumberdaya air yang operasional													
6.6.1	Perubahan tingkat sumber daya air terkait ekosistem dari waktu ke waktu.													
6.6.1 (a)	Jumlah danau yang ditingkatkan kualitas airnya													
6.6.1 (b)	Jumlah danau yang pendangkalannya kurang dari 1%.													

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
6.6.1 (c)	Jumlah danau yang menurun tingkat erosinya.													
6.6.1 (d)	Luas lahan kritis dalam Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang direhabilitasi.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL												Dishut
6.6.1 (e)	Jumlah Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang dilindungi mata airnya dan dipulihkan kesehatannya.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL												Dishut
6.a.1	Jumlah ODA terkait air dan sanitasi yang menjadi bagian rencana belanja pemerintah.													
6.b.1	Proporsi unit pemerintah lokal yang menerbitkan dan melaksanakan kebijakan dan prosedur terkait partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air dan sanitasi.													
TUJUAN 11 : KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN (MENJADIKAN KOTA DAN PEMUKIMAN INKLUSIF, AMAN, TANGGUH DAN BERKELANJUTAN)														
11.1.1	Proporsi populasi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, permukiman liar atau rumah yang tidak layak	Persentase luasan permukiman kumuh dengan luasan (10-15 ha) di Provinsi Kalimantan Selatan												Disperkim
11.1.1 (a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau	Persentase Prasarana, Sarana dan Utilitas di Permukiman dalam kondisi baik		%	87,83	89,93	94,3	92,54	89,63	90,12	94,3	●		Disperkim
11.1.1 (b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).													
11.1.1 (c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.													
11.2.1	Proporsi populasi yang mendapatkan akses yang nyaman pada transportasi publik, terpilah menurut jenis kelamin, kelompok usia, dan penyandang difabilitas.													
11.2.1 (a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan. (Jateng : Dishub)													
11.2.1 (b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar													
11.3.1	Rasio laju peningkatan konsumsi tanah dengan laju pertumbuhan penduduk.													

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
11.3.1 (a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama													
11.3.1 (b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).													
11.3.2	Proporsi kota dengan struktur partisipasi langsung masyarakat sipil dalam perencanaan dan manajemen kota yang berlangsung secara teratur dan demokratis													
11.3.2 (a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.													
11.3.2 (b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur													
11.4.1	Jumlah belanja (publik dan swasta) per kapita yang diperuntukan untuk preservasi, perlindungan, konservasi pada semua warisan budaya dan alam, menurut jenis warisan (budaya, alam, terpadu, destinasi pusat warisan dunia), tingkat pemerintahan (nasional dan sub nasional), jenis belanja (belanja operasional atau intervensi), dan tipe pembiayaan swasta (donasi non tunai, swasta non profit, sponsor).													
11.4.1 (a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.													
11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.													
11.5.1 (a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).													
11.5.1 (b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk													
11.5.1 (c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan													
11.5.2	Kerugian ekonomi langsung akibat bencana terhadap GDP, termasuk kerusakan bencana terhadap infrastruktur yang kritis dan gangguan terhadap pelayanan dasar													
11.5.2 (a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.													

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
11.6.1	Proporsi limbah padat perkotaan yang dikumpulkan secara teratur dengan pemrosesan akhir yang baik terhadap total limbah padat perkotaan yang dihasilkan oleh suatu kota.													
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Persentase pengelolaan persampahan (Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga)		%	33,85	70	75	80	49,14	060,61	72,075	▶		DLH
11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan *green waste* di kawasan perkotaan metropolitan.	Persentase pengelolaan persampahan (Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga)		Kota	0	0	1	1	0	1	1	●		DLH
11.6.2	Rata-rata tahunan materi partikulat halus (PM 2,5 dan PM 10) di Perkotaan (dibobotkan jumlah penduduk).	Persentase parameter kualitas udara yang memenuhi baku mutu												DLH
11.7.1	Proporsi ruang terbuka perkotaan untuk semua, menurut kelompok usia, jenis kelamin dan penyandang disabilitas.													
11.7.1 (a)	Persentase meningkatnya tutupan lahan untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan	Persentase meningkatnya tutupan lahan untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan		%	0,54	0,1	2,4	2,4	0,054	0,1	0,146	▶		DLH
11.7.2	Proporsi orang yang menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual menurut jenis kelamin, usia, status disabilitas, dan tempat kejadian (12 bulan terakhir).													
11.7.2 (a)	Proporsi korban kekerasan dalam 12 bulan terakhir yang melaporkan kepada polisi													
11.a.1	Proporsi penduduk yang tinggal di kota yang melaksanakan perencanaan regional dan kota terintegrasi dengan proyeksi populasi dan kebutuhan sumber daya.													
11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.													
11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	Dokumen Rencana Strategis Penanggulangan Bencana Daerah		Dok	1	1	1	1	1	1	1	●		BPBD

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
11.c.1	Proporsi dukungan finansial kepada negara kurang berkembang (LDCs) yang dialokasikan pada konstruksi dan perbaikan dengan sumberdaya yang efisien, berkelanjutan dan berketahanan dengan memanfaatkan bahan lokal.													
12.1.1*	Jumlah kolaborasi tematik *quickwins* program													
12.2.1	Jejak material (*material footprint*).													
12.2.2	Konsumsi material domestik (*domestic material consumption*).													
12.3.1	Indeks kehilangan makanan global.													
12.4.1	Jumlah pihak untuk kesepakatan lingkungan multilateral internasional tentang bahan kimia dan limbah berbahaya untuk memenuhi komitmen dan kewajiban mereka dalam transmisi informasi yang diperlukan oleh masing-masing.													
12.4.1 (a)	Jumlah peserta Proper yang mencapai minimal ranking Biru.	Persentase perusahaan yang mendapatkan peringkat biru dan/atau hijau		%	0	0	0	0	0	0	0			DLH
12.4.2	Timbulan limbah berbahaya per kapita, proporsi limbah berbahaya yang terkelola menurut jenis penanganannya													
12.4.2 (a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Persentase perusahaan yang diawasi mengelola LB3 sesuai ketentuan		%	0	0	0	0	0	0	0			DLH
12.5.1	Tingkat daur ulang Nasional, ton bahan daur ulang													
12.5.1 (a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.													
12.6.1	Jumlah perusahaan yang mempublikasi laporan keberlanjutannya	Persentase ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan			10	35	37	10	35	37	10			DLH
12.6.1 (a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.													
12.7.1	Jumlah negara yang menerapkan kebijakan pengadaan publik dan rencana aksi yang berkelanjutan.													
12.7.1 (a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.													

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
12.8.1	Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (termasuk pendidikan perubahan iklim) diarusutamakan dalam (a) kebijakan pendidikan nasional (b) kurikulum (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa.													
12.8.1 (a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister													
12.a.1	Jumlah dukungan negara-negara berkembang pada riset dan pengembangan (R&D) untuk konsumsi dan produksi berkelanjutan (SCP) dan teknologi ramah lingkungan.													
12.b.1	Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati.													
12.c.1	Jumlah subsidi bahan bakar fosil per unit GDP (produksi dan konsumsi) sebagai proporsi dari total belanja nasional pada bahan bakar fosil.													
13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Dokumen rencana kerja penanggulangan bencana		Dok	1	1	1	1	1	1	1			BPBD
13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang													
13.2.1*	Dokumen Biennial Update Report (BUR) Indonesia													
13.2.1 (a)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	Dokumen pelaporan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)		Dok	1	1	1	1	1	1	1			DLH
13.3.1	Jumlah negara yang telah mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini ke dalam kurikulum sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi													
13.3.2	Jumlah negara yang telah mengkomunikasikan penguatan kapasitas kelembagaan, sistem individu untuk melaksanakan adaptasi mitigasi dan transfer teknologi, serta kegiatan pembangunan.	Persentase Penurunan Emisi GRK dari Business as Usual												DLH

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
13.a.1	Mobilisasi sejumlah dana (USD) per tahun mulai tahun 2010 secara akuntabel mencapai komitmen sebesar 100 milyar USD.													
13.b.1	Jumlah negara-negara kurang berkembang dan negara berkembang kepulauan kecil yang menerima dukungan khusus dan sejumlah dukungan, termasuk keuangan, teknologi dan peningkatan kapasitas, untuk mekanisme peningkatan kapasitas dalam perencanaan dan pengelolaan yang efektif terkait perubahan iklim, termasuk fokus pada perempuan, generasi muda serta masyarakat lokal dan marjinal.													
TUJUAN 14 : EKOSISTEM LAUTAN (MELESTARIKAN DAN MEMANFAATKAN SECARA BERKELANJUTAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN SAMUDERA UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN)														
14.1.1	Indeks eutrofikasi pesisir (ICEP) dan kepadatan sampah plastik terapung	Kisaran rata-rata konsentrasi klorofil di perairan laut												DKPP
14.2.1	Proporsi Zona Ekonomi Eksklusif nasional yang dikelola menggunakan pendekatan berbasis ekosistem	Luas laut yang dikelola berdasarkan kewenanganan Provinsi												DKPP
14.2.1 (a)	Tersedianya kerangka kebijakan, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional.	Tersusunnya dokumen Penataan Ruang Laut Daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang ditetapkan dengan Perda												DKPP
14.2.1 (b)	Terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan.	Jumlah wilayah pengelolaan perikanan (WPP)												DKPP
14.3.1	Rata-rata keasaman laut (pH) yang diukur pada jaringan stasiun sampling yang disetujui dan memadai.	Kisaran rata-rata pH air laut												DKPP
14.4.1*	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman.	Jumlah produksi penangkapan ikan di laut yang diperbolehkan (80 % x Maximum Sustainable Yield MSY), dmana MSY Kalsel sebesar 180.000 ton.												DKPP
14.5.1*	Jumlah luas kawasan konservasi perairan	Jumlah luas kawasan perairan pantai yang direhabilitasi ekosistem terumbu karangnya		Ha	11,695	11,695	11,695	11,695						DKPP

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
		Jumlah luas kawasan pesisir yang direhabilitasi ekosistem mangrovenya												DKPP
		Jumlah luas kawasan pesisir yang direhabilitasi ekosistem padang lamunnya												DKPP
		Jumlah Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) yang dikembangkan pengelolaannya												DKPP
		Jumlah lokasi pengembangan dan peningkatan kualitas lingkungan dan pulau-pulau kecil												DKPP
14.6.1	Kemajuan negara-negara di tingkat pelaksanaan instrumen internasional yang bertujuan untuk memerangi penangkapan ikan yang ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU Fishing).	Jumlah kasus Illegal Fishing yang terjadi												DKPP
		Jumlah lokasi penerima bantuan sarana/prasarana pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan												DKPP
14.6.1 (a)	Persentase kepatuhan pelaku usaha.	Persentase Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan perikanan terhadap per undang-undangan yang berlaku		%	46	60	68	77	47	60	68	▶		DKPP
14.7.1	Perikanan berkelanjutan sebagai persentase dari PDB pada negara-negara berkembang kepulauan kecil, negara-negara kurang berkembang dan semua negara.	Rata-rata persentase Kontribusi PDRB Sektor Perikanan terhadap PDRB Kalimantan Selatan												DKPP
14.a.1	Proporsi dari total anggaran penelitian yang dialokasikan untuk penelitian di bidang teknologi kelautan.	Alokasi anggaran penelitian di bidang teknologi kelautan yang diusulkan ke BALITBANGDA Prov. Kalsel												DKPP
14.b.1*	Ketersediaan kerangka hukum/ regulasi/ kebijakan/ kelembagaan yang mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil.	Jumlah kerangka kebijakan untuk mengakui dan melindungi hak akses untuk perikanan skala kecil		Lembaga	153	153	153	160	153	153	153	▶		DKPP

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
14.b.1 (a)	Jumlah provinsi dengan peningkatan akses pendanaan usaha nelayan	Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan paket bantuan sarana usaha penangkapan ikan												DKPP
14.b.1 (b)	Jumlah nelayan yang terlindungi.	Persentase nelayan yang terlayani asuransi kenelayanannya		Orang	900	337	337	400	337	337	337	▶		DKPP
14.c.1*	Tersedianya kerangka kebijakan dan instrumen terkait pelaksanaan the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS).	Tersedianya kerangka kebijakan tentang pengawasan dan perlindungan SDI, serta penataan ruang zonasi laut		Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	●		DKPP
TUJUAN 15 : EKOSISTEM DARATAN (MELINDUNGI, MERESTORASI DAN MENINGKATKAN PEMANFAATAN BERKELANJUTAN EKOSISTEM DARATAN, MENGELOLA HUTAN SECARA LESTARI, MENGHENTIKAN PENGGURUNAN, MEMULIHKAN DEGRADASI LAHAN SERTA MENGHENTIKAN KEHILANGAN KEANEKARAGAMAN HAYATI)														
15.1.1	Kawasan hutan sebagai persentase dari total luas lahan	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL												
15.1.1 (a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan	Persentase meningkatnya tutupan lahan untuk mendukung perbaikan kualitas lingkungan												
		Indeks tutupan hutan/lahan												DLH
15.1.2	Proporsi situs penting keanekaragaman hayati daratan dan perairan darat dalam kawasan lindung, berdasarkan jenis ekosistemnya	Persentase penanganan konservasi flora dan fauna												
15.2.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan	Persentase penurunan kejadian kebakaran atau hotspot dalam kawasan hutan												
15.2.1 (a)	Luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL												
15.2.1 (b)	Luas usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL												
15.2.1 (c)	Jumlah kawasan konservasi yang memperoleh nilai indeks METT minimal 70%.													

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
15.2.1 (d)	Jumlah Kesatuan Pengelolaan Hutan.	Persentase peningkatan pemanfaatan RPHJP di KPH												
15.3.1	Proporsi lahan yang terdegradasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL												
15.3.1 (a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Persentase bertambahnya luas penanaman meliputi HTI, HPH, Rehab DAS IPPKH, PS dan RHL		%	34	11,17	33,39	55,61						DLH
15.4.1	Situs penting keanekaragaman hayati pegunungan dalam kawasan lindung.													
15.4.2	Indeks tutupan hijau pegunungan													
15.5.1*	Persentase populasi 25 jenis satwa terancam punah prioritas													
15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.													
15.7.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap													
15.7.1.(a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Persentase penurunan kasus ilegal loging												
		Persentase ketaatan dunia usaha dalam pengelolaan lingkungan		**%**	**10**	**35**	**37**	**10**	**35**	**37**	**10**	▶		DLH
15.7.1 (b)	Jumlah penambahan spesies satwa liar dan tumbuhan alam yang dikembangbiakan pada lembaga konservasi.	Persentase penanganan konservasi flora dan fauna		%	40	20	20	20						DLH
15.8.1	Proporsi negara yang mengadopsi legislasi nasional yang relevan dan memadai dalam pencegahan atau pengendalian jenis asing invasif (JAI).													
15.8.1 (a)	Rumusan kebijakan dan rekomendasi karantina hewan dan tumbuhan, serta keamanan hayati hewani dan nabati.													
15.9.1	Kemajuan pencapaian target nasional yang ditetapkan sesuai dengan Target 2 Keanekaragaman Hayati Aichi dari Rencana Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.													

Kode Indikator (3)	Indikator SDGs (4)	Indikator SDGs Kalsel (5)	Sumber Data (6)	Satuan (7)	Baseline (8)	Target SDGs (9)			Capaian SDGs (10)			Status (11)	Keterangan Capaian	Instansi Pelaksana
						2018	2019	2020	2018	2019	2020	2020	2020	
15.9.1 (a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.		Dokumen	1	1	1	1						DLH
15.a.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan	Persentase penanganan konservasi flora dan fauna												Dishut
15.b.1	Bantuan pembangunan dan pengeluaran pemerintah untuk konservasi dan pemanfaatan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya secara berkelanjutan													
15.c.1	Proporsi hidupan liar dari hasil perburuan atau perdagangan gelap													
15.c.1 (a)	Persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 dari jumlah kasus yang terjadi.	Persentase penurunan kasus ilegal loging												